

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

YUSRON AROFAH

32.0569

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.0569@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Arnold Ferdinand Bura, S.IP., M.AP.

ABSTRACT

Problem/Background: Regional Regulation of Sumenep Regency Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Social Welfare represents a strategic step in poverty alleviation and improving community welfare. One of its implementations is through the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH). However, the implementation of PKH still faces several challenges, such as limited distribution infrastructure in island regions and the low awareness of beneficiary graduation.

Purpose: This study aims to examine the effectiveness of the Family Hope Program in addressing poverty levels in Sumenep Regency. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data were obtained from both primary and secondary sources and analyzed using a thematic approach. **Results:** The Family Hope Program in Sumenep Regency is generally effective in assisting poor communities in accordance with applicable regulations. However, the program's efficiency is hampered by geographical constraints of the archipelago, limited distribution facilities, and a lack of education among beneficiaries regarding self-graduation. The use of the SIKS-NG application supports accurate program targeting, but its utilization needs to be maximized. **Conclusion:** The implementation of PKH in Sumenep requires stronger coordination between the Social Service, the regional government, and distribution banks. PKH facilitators need to be equipped with effective communication skills to motivate beneficiaries to pursue independence. Maximizing the use of SIKS-NG, conducting routine evaluations, and innovating distribution methods in island areas are essential to improving program effectiveness.

Keywords: Effectiveness, Poverty Level, Family Hope Program

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan langkah strategis dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu implementasinya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, pelaksanaan PKH masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur penyaluran di wilayah kepulauan dan rendahnya kesadaran graduasi mandiri penerima manfaat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan dalam menangani tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, lalu dianalisis secara tematik. **Hasil/Temuan:** Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sumenep secara umum efektif dalam membantu masyarakat miskin sesuai peraturan yang berlaku. Namun, efektivitas program terkendala oleh kondisi geografis kepulauan, keterbatasan sarana penyaluran bantuan, serta kurangnya edukasi kepada penerima manfaat mengenai pentingnya graduasi. Penggunaan aplikasi SIKS-NG mendukung ketepatan sasaran program, tetapi masih perlu dimaksimalkan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan PKH di Sumenep membutuhkan penguatan koordinasi antara Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten, dan lembaga keuangan penyalur. Pendamping PKH perlu dibekali keterampilan komunikasi agar dapat

memotivasi penerima untuk mandiri. Optimalisasi SIKS-NG, evaluasi rutin, serta inovasi dalam sistem penyaluran ke wilayah kepulauan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program.

Kata Kunci: Efektivitas, Tingkat Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

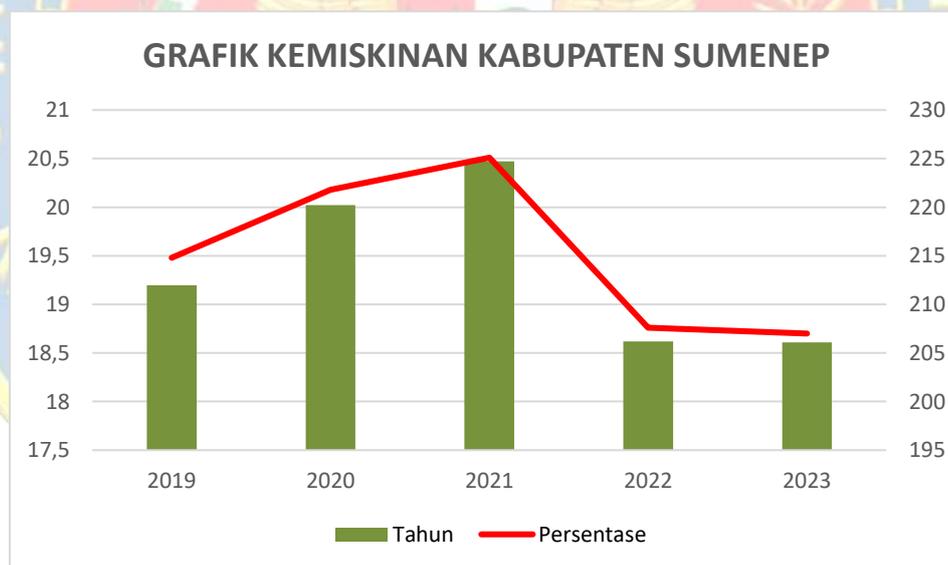
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi besar yang menghadapi tantangan sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Permasalahan ini ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, baik yang bersifat langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin, maupun tidak langsung seperti Program Jamkesmas dan BOS. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi tantangan besar, terutama karena dampak pandemi dan ketidakpastian ekonomi global.

Salah satu program strategis dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007, PKH merupakan bentuk pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan (Kemensos, 2011). Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan fokus pada keluarga sangat miskin. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui syarat-syarat seperti kepatuhan pendidikan anak, imunisasi balita, dan pemeriksaan ibu hamil.

Gambar 1. 1
Grafik Kemiskinan Kabupaten Sumenep



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2024

Di Kabupaten Sumenep, kemiskinan merupakan persoalan yang telah lama berlangsung. Meski berbagai program pemerintah telah digulirkan, efektivitasnya belum optimal. Kabupaten Sumenep menempati peringkat ke-3 wilayah termiskin di Pulau Jawa, dengan tingkat kemiskinan sebesar 17,78% berdasarkan data BPS tahun 2024. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk. Berdasarkan BPS 2024, mayoritas penduduk belum menamatkan SD (21,18%) dan hanya 2,94% yang berpendidikan S1. Faktor pendidikan yang rendah turut mempengaruhi

kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan layak (Suyanto, 2013), sehingga berdampak langsung pada rendahnya pendapatan. Program PKH di Kabupaten Sumenep diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui RPJMD 2016-2021 dan berbagai regulasi seperti Perda No. 2 Tahun 2016, telah menyelaraskan berbagai upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi peran Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat. Meskipun begitu, tantangan masih ada, salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administratif bantuan sosial.

Program PKH memberikan dua jenis bantuan kepada penerima manfaat: bantuan sembako dan bantuan uang tunai. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Guru et al., 2020), nominal bantuan disesuaikan dengan kondisi rumah tangga, seperti jumlah anak usia sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Sebagai contoh, anak usia SD menerima Rp900.000 per tahun, sedangkan lansia dan disabilitas berat menerima Rp2,4 juta per tahun. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan PKH dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Sumenep, penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Gibson dan Steers yang mencakup lima indikator, yaitu: produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, waktu, dan kepuasan.

1.2 Gap Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dijawab melalui kajian empiris. Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah banyak dikaji di berbagai daerah di Indonesia, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus menelaah efektivitas program ini di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, padahal daerah ini menempati posisi ketiga tertinggi angka kemiskinan di Pulau Jawa menurut data BPS tahun 2024. Selain itu, terdapat kesenjangan antara tujuan program PKH yang ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan angka kemiskinan di Sumenep masih cukup tinggi. Penelitian sebelumnya juga belum banyak menggunakan pendekatan efektivitas berdasarkan indikator Gibson dan Steers, yang mencakup produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, ketepatan waktu, dan kepuasan, sehingga pendekatan ini memberikan nilai tambah dalam kajian ini. Lebih lanjut, tingkat pendidikan masyarakat Sumenep yang sebagian besar rendah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program PKH, namun belum banyak dieksplorasi hubungannya dengan efektivitas program. Hambatan-hambatan implementasi di lapangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administratif dan pelaksanaan regulasi daerah, juga menjadi aspek yang kurang tereksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif efektivitas program PKH di Kabupaten Sumenep.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan memiliki hasil yang bervariasi tergantung pada konteks wilayah dan indikator yang digunakan. Pratiwi (2020) menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan program dan kondisi ekonomi penerima manfaat yang mulai mandiri, menunjukkan bahwa efektivitas PKH perlu dievaluasi dari berbagai dimensi seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Senada, Kartiawati (2017) menyoroti kelemahan dalam implementasi PKH dari perspektif ekonomi Islam, terutama terkait keadilan distribusi dan kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.

Sementara itu, Nurhafifa (2022) dan Purwanto (2013) menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH berjalan cukup baik di beberapa wilayah, dengan kontribusi signifikan dalam peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks pengukuran kemiskinan, Tsui (2002) menekankan pentingnya pendekatan multidimensi yang memperhatikan berbagai kebutuhan dasar, sementara Carter dan Barrett (2006) memperkenalkan pendekatan berbasis aset untuk membedakan antara kemiskinan sementara dan struktural. Di sisi lain, Joshua Blumenstock et al. (2015) menawarkan pendekatan inovatif dengan memanfaatkan data penggunaan ponsel untuk memprediksi status sosial ekonomi, yang sangat relevan untuk negara berkembang dengan keterbatasan data.

Menambahkan pada literatur yang ada, Kumbara (2023) menunjukkan bahwa efektivitas PKH dapat tercapai dengan pendekatan yang fleksibel dan partisipatif, terutama dalam konteks geografis yang kompleks. Namun, Kumbara juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengatasi keterbatasan administratif, distribusi bantuan, serta pemutakhiran data. Ini menegaskan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial sangat kontekstual dan bergantung pada kebijakan yang adaptif serta berbasis data lokal.

Lebih luas lagi, Dankumo (2023) meneliti peran perbelanjaan publik (belanja sosial pemerintah) dan menemukan bahwa efektivitas pengeluaran negara dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada kualitas tata kelola. Tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat dampak pengeluaran pada sektor sosial seperti pendidikan dan perlindungan sosial. Sebaliknya, korupsi dan birokrasi yang lemah cenderung menghambat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola dan pengawasan publik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program sosial seperti PKH.

Penelitian dari Purmiyati (2021) di Jawa Timur fokus pada efisiensi teknis usaha mikro sektor pertanian yang didukung oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hasilnya menunjukkan bahwa akses terhadap KUR secara signifikan meningkatkan efisiensi usaha dan berdampak pada pengurangan kemiskinan, terutama ketika dipadukan dengan faktor-faktor seperti aset, jumlah kredit, dan lokasi usaha. Studi ini menegaskan pentingnya dukungan akses keuangan dalam memberdayakan masyarakat miskin, yang dapat menjadi pelengkap dari program sosial seperti PKH. Sementara itu, Bakar (2020) memberikan perspektif dari Malaysia dengan menyoroti kelemahan pengukuran kemiskinan yang hanya mengandalkan dimensi pendapatan. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti Random Forest, penelitian ini berhasil mengklasifikasikan kemiskinan secara multidimensional dengan tingkat akurasi tinggi (hingga 99%), menggunakan variabel-variabel seperti pendapatan per kapita, lokasi geografis, dan tingkat pendidikan. Hasil ini membuka peluang penggunaan teknologi cerdas dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial yang lebih presisi dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, literatur sebelumnya memberikan fondasi penting untuk memahami efektivitas program perlindungan sosial seperti PKH, serta pentingnya pendekatan yang multidimensi, adaptif, berbasis data, didukung teknologi, dan tata kelola yang baik dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang sekaligus menjadi dasar kebaruan ilmiah (scientific novelty) dalam konteks pengkajian efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertama, penelitian ini mengangkat konteks geografis yang khas, yaitu Kabupaten Sumenep sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Jawa Timur. Banyak penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Purwanto (2013), Nurhafifa (2022), dan Pratiwi (2020), cenderung berfokus pada wilayah daratan atau perkotaan yang memiliki infrastruktur relatif memadai. Sebaliknya, penelitian ini secara mendalam mengkaji dampak kondisi geografis kepulauan terhadap pelaksanaan program, terutama dari aspek waktu dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Hal ini memperkaya pemahaman bahwa efektivitas program perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh topografi dan ketersediaan infrastruktur lokal.

Kedua, penelitian ini menggunakan kerangka analisis efektivitas dari Gibson dan Steers (2005) yang mencakup lima indikator utama: produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, waktu, dan kepuasan. Sementara banyak studi terdahulu, seperti milik Kartiawati (2017) atau Tsui (2002), lebih menekankan pada dimensi ekonomi atau kesejahteraan secara umum, penelitian ini menggabungkan dimensi kinerja organisasi dan persepsi masyarakat penerima manfaat secara simultan, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan operasional terhadap pengukuran efektivitas program sosial.

Ketiga, penelitian ini tidak hanya menilai outcome dari PKH berupa graduasi penerima manfaat, tetapi juga mengeksplorasi aspek perilaku sosial penerima manfaat dan pendekatan humanis yang digunakan oleh pendamping PKH, sebagaimana tercermin dalam dimensi fleksibilitas. Hal ini berbeda dari pendekatan penelitian sebelumnya seperti Carter dan Barrett (2006) yang lebih berfokus pada

pendekatan ekonomi berbasis aset, atau Dankumo (2023) yang menekankan kualitas tata kelola. Penelitian ini justru menggabungkan sisi bottom-up dari interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, yang selama ini belum banyak dikaji secara kualitatif dalam konteks wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Keempat, dibandingkan dengan pendekatan teknologi yang ditawarkan Bakar (2020) atau Blumenstock et al. (2015) yang lebih teknokratik dan berbasis algoritma dalam identifikasi kemiskinan, penelitian ini menghadirkan data empirik berbasis lokal melalui wawancara mendalam dengan penerima manfaat, pendamping, dan kepala dinas. Pendekatan ini memberikan nilai tambah kualitatif yang relevan dan kontekstual bagi pengambil kebijakan daerah yang sering menghadapi keterbatasan data atau infrastruktur teknologi.

Terakhir, dari sisi kebaruan kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi spesifik bagi wilayah kepulauan, seperti pentingnya penyediaan layanan perbankan di pulau-pulau terpencil dan penguatan koordinasi antar-instansi. Rekomendasi ini belum banyak dikemukakan dalam studi sebelumnya yang cenderung bersifat umum.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi program.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, dinamika sosial, serta kendala-kendala di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Moleong (2012), peneliti dalam pendekatan kualitatif berperan sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Dengan demikian, validitas dan kebermaknaan hasil sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif peneliti.

Konsep efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada teori Gibson dan Steers (2005), yang mencakup lima dimensi utama yaitu produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, waktu, dan kepuasan. Dimensi ini dijabarkan ke dalam sejumlah indikator operasional, seperti capaian program, ketepatan waktu penyaluran, serta kemampuan program dalam beradaptasi dengan kondisi sosial dan geografis setempat. Hal ini dituangkan dalam tabel operasionalisasi konsep sebagai dasar pengukuran dan analisis data. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan pengamatan lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, buku, peraturan, dan laporan resmi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dan accidental sampling, dengan melibatkan pejabat struktural di Dinas Sosial, pendamping PKH, serta masyarakat penerima manfaat. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2017), purposive sampling didasarkan pada pertimbangan tertentu bahwa informan memahami substansi program, sedangkan accidental sampling melibatkan informan yang ditemui secara insidental namun relevan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2016) bahwa keberhasilan penelitian kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengolah dan menginterpretasikan data. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan tiga teknik utama yaitu observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Teknik observasi memungkinkan peneliti menangkap gejala sosial secara langsung di lapangan. Seperti dijelaskan oleh A. Muri Yusuf (2014), observasi melibatkan subjektivitas pengamat yang memberi makna pada data. Sementara itu, wawancara semi terstruktur dipilih agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih terbuka dan mendalam dari narasumber. Dalam teknik wawancara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, menyiapkan pedoman wawancara. Kedua, menyiapkan alat untuk wawancara. Ketiga, mengatur waktu untuk wawancara

(Simangunsong, 2017:215). Pendekatan ini umumnya lebih sesuai dan efisien dalam situasi di mana jumlah responden relatif terbatas (Nurdin & Hartati). Di sisi lain, teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara, untuk memperkuat keabsahan data melalui sumber-sumber tertulis dan visual, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2015) dan Nilamsari (2014). Dalam konteks pendekatan kualitatif, penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau paradigma interpretive, yang memandang bahwa realitas sosial tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel-variabel yang berdiri sendiri. Sebaliknya, realitas harus dipahami secara holistik dan menyeluruh, karena bersifat dinamis dan kompleks (Ridwan & Tungka, 2024). Adapun teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman (2012) yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini bersifat siklus dan terus berlangsung selama penelitian, bukan linier. Reduksi data membantu menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi, penyajian data memudahkan visualisasi informasi dalam bentuk matriks atau tabel, sementara kesimpulan diambil dengan memverifikasi data yang telah dianalisis untuk memastikan keabsahannya. Melalui pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas PKH di Kabupaten Sumenep, mengungkap hambatan yang dihadapi, serta menyajikan strategi dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk peningkatan program di masa depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dilaksanakan guna membantu masyarakat kurang mampu atau yang termasuk kedalam golongan masyarakat miskin, harapannya dengan adanya Program Keluarga Harapan ini dapat membantu meringankan beban biaya yang ada. Dalam bagian ini, peneliti akan membahas dan menganalisa data yang telah didapatkan terkait pelaksanaan program ini dalam mengatasi kemiskinan yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian, ditemukan beberapa masalah sehingga peneliti merasa perlu adanya penelitian terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan. Efektivitas PKH dikatakan berjalan dengan baik jika pelaksanaan indikator sudah dilaksanakan, oleh karena itu berdasarkan teori efektivitas menurut Gibson dan Steers (2005) yang digunakan peneliti. Dengan indikator teori diantaranya produktivitas, efisiensi, fleksibilitas, waktu, kepuasan.

1. Produktivitas

Produktivitas dalam penelitian ini mengacu pada kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama dalam mendata dan menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Program ini menargetkan kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada tahun 2024, terdapat 65.026 penerima manfaat PKH di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep. Data ini menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau kelompok sasaran secara luas dan sesuai dengan standar dari Kementerian Sosial. Kinerja Dinas Sosial dalam program PKH juga tercermin melalui proses graduasi atau keluarnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program.

Graduasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu graduasi alamiah (misalnya karena anak lulus sekolah atau penerima lansia meninggal) dan graduasi mandiri (keluarga merasa sudah mampu secara ekonomi). Data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan jumlah KPM yang melakukan graduasi, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Ini menandakan bahwa sebagian penerima PKH berhasil meningkatkan taraf hidupnya dan tidak lagi bergantung pada bantuan.

Tabel 1.1
Graduasi PKH Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024

No	Tahun	Graduasi		Jumlah
		Alamiah (Tidak memiliki komponen)	Sejahtera atau mandiri	
1	2020	0	0	0
2	2021	0	0	0
3	2022	21	16	37
4	2023	81	12	93
5	2024	78	45	123

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

Selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021, tidak ada graduasi karena kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan justru meningkat. Hal ini dijelaskan oleh operator SIKS-NG sebagai upaya adaptif dari Dinas Sosial dalam merespons situasi darurat. Meski demikian, setelah pandemi mereda, proses graduasi kembali dilakukan, menunjukkan kembalinya sistem verifikasi data dan pemutakhiran secara berkala.

Program PKH juga memiliki mekanisme otomatisasi dalam pengelolaan data, terutama pada komponen pendidikan. Jika seorang anak yang sebelumnya menerima bantuan telah lulus dan tidak melanjutkan sekolah, maka bantuan akan dihentikan secara otomatis. Selain itu, kuota penerima yang telah lulus (graduasi) akan digantikan oleh masyarakat miskin lain yang memenuhi syarat, mengingat data dari DTKS menunjukkan masih terdapat 196.420 jiwa masyarakat miskin yang bisa menjadi calon penerima. Dengan sistem pendataan yang terstruktur dan penyaluran yang tepat sasaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Sumenep telah memenuhi aspek produktivitas yang diharapkan.

2. Efisiensi

Aspek efisiensi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait kondisi geografis daerah kepulauan. Efisiensi dalam konteks ini mengacu pada kemampuan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan hasil maksimal, termasuk dalam hal waktu, biaya, dan tenaga. Penyaluran bantuan PKH yang dilakukan setiap tiga bulan, yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, memerlukan strategi yang tepat agar bantuan dapat sampai ke penerima dengan lancar dan tepat waktu. Namun, berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Drs. Mustangin, M.Si, disampaikan bahwa medan wilayah yang terdiri dari banyak pulau menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Masalembu dan Kecamatan Sapeken memiliki jarak tempuh yang sangat jauh, masing-masing memakan waktu hingga 12 dan 20 jam perjalanan, baik melalui jalur darat maupun laut. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan dari sisi waktu, tetapi juga dari segi operasional dan biaya.

Keterbatasan sarana dan prasarana perbankan di wilayah kepulauan turut memperburuk situasi. Minimnya akses terhadap layanan perbankan menyebabkan proses pencairan dan distribusi dana menjadi tidak efisien. Jika terdapat unit perbankan di daerah tersebut, proses penyaluran tentu dapat

berlangsung lebih cepat dan mudah, tanpa memerlukan upaya tambahan dari tim penyalur bantuan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Sumenep, khususnya di wilayah kepulauan, belum sepenuhnya memenuhi aspek efisiensi. Untuk meningkatkan efisiensi ke depan, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Sosial dan pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana perbankan di wilayah-wilayah terpencil. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, penyaluran bantuan akan terus menghadapi hambatan yang mengganggu efektivitas dan efisiensi program.

3. Fleksibilitas

Aspek fleksibilitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep tercermin dari kemampuan pendamping dan pelaksana program dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Fleksibilitas ini penting dalam memastikan bahwa program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika masyarakat di lapangan. Dalam konteks PKH, fleksibilitas bukan berarti mengubah aturan yang telah ditetapkan, melainkan menyesuaikan pendekatan pelaksanaan agar lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan. Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH, Bapak Heru Budiarto, diketahui bahwa tugas pendamping tidak hanya sebatas mendampingi penyaluran dana, tetapi juga memberikan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bisa memahami pentingnya kemandirian ekonomi. Pendamping diharuskan untuk bersikap fleksibel dalam menghadapi berbagai karakteristik masyarakat, termasuk dalam hal kesiapan mental dan kesadaran untuk melakukan graduasi mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh para pendamping bersifat humanis dan tidak memaksakan kehendak, melainkan mendorong kesadaran masyarakat untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan secara sukarela.

Fleksibilitas juga terlihat dalam sikap pendamping yang memahami bahwa setiap KPM memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan tidak bisa bersifat seragam. Pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif ini menjadi kunci dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Meskipun pendamping bisa mengidentifikasi keluarga yang sudah mampu, namun proses graduasi mandiri tetap harus berasal dari kesadaran KPM itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Sumenep telah memenuhi aspek fleksibilitas, terutama dalam hal pendekatan terhadap masyarakat. Pendamping yang bertugas tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat, sesuai dengan tujuan utama program, yaitu mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Waktu

Aspek waktu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan komponen penting untuk memastikan bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat dan sesuai jadwal. Sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial, penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahun, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Dinas Sosial Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana di tingkat daerah bertanggung jawab memastikan bantuan disalurkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial, Drs. Mustangin, M.Si, terdapat kendala serius dalam aspek waktu, terutama di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Masalembu. Akses yang sulit, ketiadaan fasilitas perbankan, dan kebutuhan akan transportasi laut menyebabkan keterlambatan penyaluran. Waktu tempuh yang panjang, sekitar 12 jam perjalanan laut ditambah waktu distribusi secara manual, membuat proses penyaluran memakan waktu 2 hingga 3 hari. Meski demikian, untuk wilayah daratan atau kecamatan yang memiliki akses lebih mudah, penyaluran dana PKH dapat dilakukan tepat waktu tanpa hambatan berarti.

Kondisi ini juga dikuatkan oleh pernyataan salah satu penerima manfaat dari Masalembu, Bapak Alam, yang menyadari keterlambatan penyaluran bukan karena kelalaian, tetapi karena kondisi geografis yang memang menantang. Masyarakat di wilayah kepulauan memahami kondisi tersebut dan menunjukkan sikap kooperatif, meskipun keterlambatan tetap menjadi masalah yang harus segera diatasi demi keadilan dan kesetaraan dalam layanan sosial. Dengan demikian, meskipun Dinas Sosial telah berupaya maksimal dalam penyaluran dana PKH, aspek waktu belum sepenuhnya terpenuhi,

khususnya di wilayah kepulauan. Keterlambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses distribusi yang lebih efisien dan tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, termasuk daerah-daerah terpencil.

5. Kepuasan

Aspek kepuasan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep menunjukkan hasil yang positif dan menjadi indikator keberhasilan program dalam menjangkau serta membantu masyarakat miskin. Kepuasan ini dinilai dari persepsi dan pengalaman langsung para penerima manfaat, baik yang masih aktif dalam program maupun yang telah lulus atau graduasi. Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH, Bapak Heru Budianto, terungkap bahwa bantuan PKH sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam meringankan beban ekonomi, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan anak dan pemenuhan hidup lansia. Meskipun dana diberikan hanya empat kali dalam setahun, masyarakat tetap merasa terbantu dan menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat berarti dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pernyataan dari Ibu Juhariyah, seorang lansia penerima PKH, menguatkan gambaran kepuasan penerima. Ia menyampaikan bahwa bantuan PKH tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sangat bermanfaat untuk keperluan mendesak seperti membeli obat. Ini menunjukkan bahwa program PKH memiliki dampak nyata dalam membantu kelompok rentan secara langsung.

Tabel 1.2
Jumlah Graduasi Tahun 2023-2024

No	Tahun	Graduasi		Jumlah
		Alamiah (Tidak memiliki komponen)	Sejahtera atau mandiri	
1	2023	81	12	93
2	2024	78	45	123

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep 2025

Lebih jauh lagi, tingkat graduasi yang meningkat, terutama pada tahun 2024 dengan total 123 KPM yang keluar dari program karena kondisi ekonomi yang membaik, juga menjadi indikator bahwa PKH berhasil memberdayakan masyarakat. Pernyataan dari Ibu Nurjanah, seorang mantan penerima PKH, menyebutkan bahwa ia dapat menggunakan dana bantuan sebagai modal usaha hingga akhirnya mampu keluar dari garis kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberi bantuan sementara, tetapi juga mampu menjadi trigger perubahan ekonomi jangka panjang.

Dengan berbagai testimoni dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek kepuasan telah terpenuhi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Sumenep. Program ini tidak hanya berhasil membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memotivasi dan membekali masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun penguatan ekonomi keluarga.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam beberapa indikator seperti produktivitas, fleksibilitas, dan kepuasan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam efisiensi dan waktu, terutama pada wilayah kepulauan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di daerah dengan karakteristik geografis kompleks tetap dapat berjalan secara efektif dengan dukungan kelembagaan dan adaptasi di lapangan. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan temuan Alya Nurhafifa (2022) dan Purwanto (2013) yang menyatakan bahwa PKH berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat miskin di berbagai wilayah, meskipun tantangan teknis dan implementatif tetap ada.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa graduasi mandiri dan alamiah dari program terus meningkat sejak tahun 2022 hingga 2024, menandakan bahwa PKH bukan hanya program bantuan konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi bagi sebagian penerima manfaat. Temuan ini berbeda dari Desi Pratiwi (2020) yang menemukan ketidaksesuaian antara tujuan PKH dan kondisi ekonomi sebagian penerima yang sebenarnya sudah mandiri namun masih tetap menjadi peserta program. Penelitian di Kabupaten Sumenep justru menunjukkan bahwa dengan pendekatan edukatif dan persuasif dari pendamping, kesadaran untuk graduasi mandiri bisa tumbuh, meskipun memerlukan waktu dan pendekatan yang fleksibel.

Temuan ini juga memperkuat pendekatan yang diusulkan oleh Tsui (2002) terkait pentingnya indikator kemiskinan multidimensi. Dalam pelaksanaan PKH di Sumenep, aspek pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi semua menjadi komponen yang diperhatikan, baik dalam penyaluran bantuan maupun proses evaluasi kelayakan peserta. Hal ini membuktikan bahwa intervensi sosial yang memperhatikan banyak dimensi kehidupan masyarakat lebih mampu menghasilkan perubahan struktural yang mendalam dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dalam konteks implementasi, kendala geografis yang dihadapi Sumenep memperkuat kritik dari Kartiawati (2017) terkait ketidaktepatan sasaran dan lemahnya distribusi yang adil dalam pelaksanaan PKH menurut perspektif ekonomi Islam. Meskipun tidak ditemukan ketidakadilan secara sistematis, keterbatasan akses akibat infrastruktur yang belum memadai dapat menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pelayanan antar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada mekanisme internal, tetapi juga pada dukungan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor.

Menariknya, pendekatan berbasis teknologi seperti yang ditawarkan oleh Joshua Blumenstock et al. (2015) yang memanfaatkan data ponsel untuk mengidentifikasi status sosial ekonomi belum diterapkan di Sumenep. Jika dimanfaatkan, pendekatan ini dapat mengatasi kendala data yang sering terjadi di wilayah terpencil dan mendukung proses verifikasi serta pemutakhiran data secara lebih efisien dan akurat. Oleh karena itu, integrasi teknologi dan pendekatan berbasis data dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program di masa mendatang, terutama pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dengan menunjukkan bahwa efektivitas PKH dapat tercapai dengan pendekatan fleksibel dan partisipatif, namun tetap membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi keterbatasan geografis dan administratif. Perbandingan ini menegaskan bahwa efektivitas program perlindungan sosial seperti PKH sangat kontekstual, dan kebijakan yang adaptif berbasis data lokal menjadi kunci keberhasilannya.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dengan capaian yang cukup baik pada aspek produktivitas, fleksibilitas, dan kepuasan penerima manfaat. Program ini berhasil menjangkau sasaran secara luas dan mendorong peningkatan kemandirian ekonomi melalui proses graduasi. Pendamping PKH juga berperan penting dengan pendekatan yang humanis dan edukatif, sehingga membantu penerima manfaat memahami pentingnya kemandirian. Namun, efektivitas program ini masih terbatas oleh kendala geografis dan infrastruktur yang memengaruhi efisiensi dan ketepatan waktu penyaluran bantuan, terutama di wilayah kepulauan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus pada wilayah Kabupaten Sumenep yang memiliki karakteristik geografis khusus berupa kepulauan, sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi untuk wilayah lain dengan kondisi berbeda. Selain itu, data yang digunakan sebagian besar bersifat kualitatif dan terbatas pada beberapa kecamatan tertentu. Penelitian juga belum mendalami pemanfaatan teknologi informasi dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan, serta hanya mencakup data hingga tahun 2024 sehingga belum dapat menggambarkan dinamika setelahnya.

Arah Masa Depan Penelitian

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif antara daerah kepulauan dan daratan agar strategi pengentasan kemiskinan dapat diadaptasi sesuai karakteristik wilayah. Pengembangan integrasi teknologi seperti big data dan aplikasi digital perlu dikaji untuk meningkatkan efisiensi program. Selain itu, penelitian jangka panjang sangat dibutuhkan untuk memantau dampak sosial dan ekonomi PKH secara menyeluruh. Terakhir, evaluasi terhadap kebijakan dan pembangunan infrastruktur, terutama layanan perbankan dan transportasi di wilayah terpencil, juga penting agar distribusi bantuan dapat berjalan lebih optimal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. A., Hamdan, R., & Sani, N. S. (2020). Ensemble learning for multidimensional poverty classification. *Sains Malaysiana*, 49(2), 447–459. <https://doi.org/10.17576/jsm-2020-4902-24>
- Carter, M. R., & Barrett, C. B. (2006). The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. *The Journal of Development Studies*, 42(2), 178–199. <https://doi.org/10.1080/00220380500405261>
- Dankumo, A. M., Is`Hak, S., Auta, Y., & Denthe, A. (2023). Impact of public expenditure on poverty: Role of governance. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 57(1). <https://doi.org/10.17576/JEM-2023-5701-09>
- Joshua Blumenstock et al. (2015). Predicting poverty and wealth from mobile phone metadata. *Science*, 350, 1073-1076. <https://doi.org/10.1126/science.aac4420>
- Kumbara, A. A. N. A., Liando, M. R., & Sutrisno, N. (2023). Empowerment of Structures and Agents in Cultural Poverty Alleviation in West Tanyar Village Karangasem Regency Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 13(2), 598–622. <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i02.p11>
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2012). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Makassar: Media Sahabat Cendekia.
- Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 16(2), 79-96.
- Purmiyati, A., Setyowati, R., & Rakhima, M. S. (2021). The role of microcredit program and micro enterprises in poverty reduction. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 55(2). <https://doi.org/10.17576/JEM-2021-5502-3>
- Pratiwi, D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode Penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: InTrans Publishing.
- Tsui, Ky. (2002). Multidimensional poverty indices. *Social Choice and Welfare*, 19, 69–93.
<https://doi.org/10.1007/s355-002-8326-3>
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

